

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana sebagian besar kegiatan ekonominya masih berpusat pada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor fundamental dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan banyak sektor lain yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku produksi. Di sisi lain produk hasil pertanian merupakan produk ekspor utama di Indonesia, artinya sebagian besar penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian sehingga pendapatan yang berasal dari sektor pertanian masih bagian terbesar dari PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. Di Indonesia, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Selain memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber investasi, penyedia lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penghasil devisa negara melalui ekspor dan sebagainya (Insyafiah, 2014).

Namun demikian usaha sektor pertanian dianggap usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian yang cukup tinggi karena perubahan iklim yang ekstrem, serangan hama dan penyakit. Risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usahatani antaranya: risiko produksi, harga, pasar, finansial, teknologi, sosial, hukum dan manusia. Usaha pencapaian target swasembada pangan khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani (Pasaribu, 2014).

Salah satu komoditas pertanian yang menjadi komoditas potensial di Indonesia yakni komoditas tanaman padi. Padi merupakan komoditas strategis karena termasuk makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga fluktuasi produksi dan harga padi dapat menimbulkan risiko (Reoekasah, 2004). Perubahan iklim yang tidak menentu dapat memberikan dampak buruk dalam sektor pertanian. Kekeringan merupakan salah satu dampak dari iklim yang kini tidak menentu akibat dari adanya musim kemarau yang panjang. Demikian pula ketika terjadi musim penghujan yang curah hujannya cenderung tinggi, dapat

mengakibatkan banjir. Perubahan iklim tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan gagal panen yang akan mengakibatkan kerugian bagi petani, sehingga tidak sedikit petani yang produktivitasnya menurun akibat kekurangan modal. Hal ini juga mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta dapat mengancam keanekaragaman hayati dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Perubahan iklim dapat membuat fluktuasi produksi padi. Penurunan produksi hasil, gagal panen serta risiko fluktuasi harga juga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan petani. Sehingga petani akan mengalami kerugian yang cukup besar. Maka peran usahatani tanaman padi dalam pemenuh kebutuhan pangan masyarakat tampaknya harus disertai dengan persiapan sifat pertanian yang tahan terhadap risiko (Marphy, 2019).

sebagai upaya membantu mengatasi kerugian petani, maka Pemerintah industri mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk Asuransi pertanian. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani, sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021)

Dengan adanya asuransi pertanian petani akan memperoleh jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tanaman (OPT), dan petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Jenis asuransi pertanian yang telah diterapkan di Indonesia adalah Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Insyafilah, 2014). Namun, Informasi tentang asuransi pertanian ini masih belum meluas kepada masyarakat yang bergelut dibidang usahatani padi dan ternak sapi. Masih banyak petani dan peternak yang tidak mengetahui keberadaan dari program asuransi pertanian AUTP dan AUTS (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Adanya asuransi pertanian, pemerintah mengharapkan para petani mengikuti program asuransi pertanian dalam menangani risiko yang di hadapi usahatannya. Dalam kenyataanya

realisasi program asuransi usahatani padi (AUTP) di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Realisasi luas lahan sawah yang diasuransikan di Indonesia selama lima tahun kebelakang dari 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Realisasi angka pelaksanaan AUTP pada 2017, dengan luasan lahan sebesar 997,9 ribu hektar atau setara dengan 99,8 persen dari target yang dicanangkan. Pada 2018 angka realisasi mulai menurun menjadi 806,2 ribu hektar yang setara dengan 80,6 persen dari target. Di tahun 2019 hingga 2020, angka realisasi kembali meningkat menjadi 97,1 persen hingga mencapai target 100 persen, namun tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 40,01 persen. Ini menunjukkan bahwa AUTP belum sepenuhnya berjalan lancar. Salah satu faktor penyebab menurunnya luas lahan yang diasuransikan yaitu adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga program AUTP yang disubsidi 80 persen oleh pemerintah dihentikan pada bulan Agustus 2021. Hal tersebut membuat petani enggan untuk mengikuti program AUTP karena harus membayar premi 100 persen atau Rp 144.000/ha.

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan AUTP di Indonesia Tahun 2017-2021.

NO	Tahun	Target Luas (ha)	Realisasi (ha)	Presentase (%)
1	2017	1.000.000	997.961	99,80
2	2018	1.000.000	806.199	80,62
3	2019	1.000.000	971.218	97,10
4	2020	1.000.000	1.000.001	100,00
5	2021	1.000.000	400.001	40,01

Sumber : Kementerian Pertanian, 2021

Dalam buku statistik kementerian pertanian 2021 Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah Indonesia di pulau Jawa yang mengikuti program AUTP dari tahun 2017-2021 yang mencapai realisasi 678.576,27 Hektar. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang mengikuti program AUTP dan memiliki luas lahan sawah sebesar 5.790 hektar dalam 10 Kecamatan. Berdasarkan luas lahan, Kota Tasikmalaya mengalami fluktuatif dalam luas lahan yang terdaftar pada AUTP target yang ditetapkan untuk Kota Tasikmalaya juga berbeda setiap tahunnya.

Tabel 2. Data Realisasi Luasan lahan terdaftar AUTP Kota Tasikmalaya 2018-2022

NO	Tahun	Target Luas (ha)	Realisasi (ha)	Presentase (%)
1	2018	500	400,83	80,16
2	2019	400	400,78	100,00
3	2020	600	642,11	100,00
4	2021	600	372,49	62,08
5	2022	600	288,68	48,11

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya,2023

Pada Tabel 2 bahwa Kota Tasikmalaya terdaftar dalam program AUTP. Tercatat pada lima tahun kebelakang dari 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Realisasi angka pelaksanaan AUTP pada 2018, dengan luasan lahan sebesar 400,8 hektar atau setara dengan 80,16 persen dari target yang direncanakan. Di tahun 2019 hingga 2020, angka realisasi kembali meningkat menjadi 100 persen dengan mencapai target, namun tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 62,08 persen hingga 48,11 persen. Oleh karena itu di Kota Tasikmalaya Kecamatan Cibeureum merupakan salah satu kecamatan yang mengikuti program AUTP. Pada data Tabel 2 menurut salah satu penyuluh di Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Cibeureum, faktor utama yang menyebabkan penurunan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Akibatnya Dinas Pertanian tidak bisa memenuhi target AUTP dari pemerintah pusat. Selain itu, terdapat diduga faktor lain yaitu kesadaran atau ikutsertaan petani yang belum baik mengenai program AUTP.

Tabel 3. Realisasi Luas Lahan Kecamatan Cibeureum dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

NO	Tahun	Realisasi (ha)
1	2018	47,00
2	2019	86,00
3	2020	107,68
4	2021	66,68
5	2022	47,68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya,2023

Tercatat pada Tabel 3, tahun 2022 Kecamatan Cibeureum memiliki luas lahan realisasi AUTP seluas 47,86 Ha. Angka tersebut merupakan angka terkecil dibanding kurun waktu 2 tahun terakhir seluas 107,68 Ha. Walaupun terjadi fluktuasi realisasi lahan AUTP yang cenderung menurun dari tahun 2020 sampai 2022. Namun, pendaftar program AUTP lebih banyak di dorong oleh Penyuluh

BPP Cibeureum yang memang langsung di sosialisasikan kepada petani dengan diberikan pemahaman pada program AUTP tersebut. Padahal, program AUTP sangatlah efektif untuk diikuti karena tujuan dari diselenggarakannya AUTP tersebut adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen. Hal tersebut seharusnya tidak perlu dikhawatirkan lagi dengan adanya program AUTP. Masih terdapat sebagian petani yang belum memahami pentingnya asuransi, kebanyakan yang memahami pentingnya asuransi itu sendiri yaitu para pengurus kelompok. Hal tersebut terkait dengan kesadaran petani dalam manajemen risiko belum terbentuk atau sosialisasi yang belum merata. pemahaman yang belum merata menimbulkan sikap petani yang berbeda-beda.

Maka berdasarkan uraian diatas hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas dalam mengikuti program AUTP perlu dianalisis. Fenomena bagi peneliti cukup menarik untuk dikaji, dikarenakan program AUTP yang di katakan efektif oleh penyuluh apakah juga dirasakan oleh petani padi, dan apakah setiap petani dengan karakteristik berbeda merasakan efektivitas yang berbeda.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana karakteristik petani peserta program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum?
- 2) Bagaimana tingkat efektivitas program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum?
- 3) Apakah ada hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui karakteristik petani peserta program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum
- 2) Menganalisis tingkat efektivitas program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum
- 3) Menganalisis hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Cibeureum

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Bagi Penulis, mendapatkan pengalaman serta informasi baru mengenai hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas dalam program AUTP untuk petani dalam melindungi usahatannya.
- 2) Bagi Petani, sebagai informasi pentingnya Asuransi Usahatani Padi (AUTP) untuk mendukung produktivitas usahatannya.
- 3) Bagi Pemerintah, sebagai acuan dan evaluasi untuk program-program selanjutnya.
- 4) Bagi pengembangan ilmu, sebagai tambahan informasi apabila ada penelitian sejenis ataupun sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penyusunan penelitian yang serupa